



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Dr. Abdul Saman, S.Pd., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar) 2. Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si. (Kepala Staf Ahli UPI Bandung) 3. K.H. Drs. Arifin Junaidi, M.M. (Sekretaris BSNP) 4. Doni Koesma A.M.Ed. (Anggota BSNP) 5. Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M. (Anggota BSNP)
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 November 2020.
Pukul	: 10.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Peta Jalan Pendidikan)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: 1. Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari sisi aspek kebijakan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan (Merdeka Belajar); 2. Isu lain yang berkaitan pembangunan pendidikan nasional
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 31 orang anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Dr. Abdul Saman, S.Pd (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM) 2. Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si. (Kepala Staf Ahli UPI Bandung) 3. KH. Arifin Junaedi (Sekretaris BSNP) 4. Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M (Anggota BSNP) 5. Done Koesoema A. M.Ed (Anggota BSNP)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Peta Jalan Pendidikan), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan Dr. Abdul Saman, S.Pd. (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM), Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si. (Kepala Staf Ahli UPI Bandung) dan BSNP serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dr. Abdul Saman, S.Pd. (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM), Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si. (Kepala Staf Ahli UPI Bandung) dan BSNP yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia (*bahan terlampir*), antara lain:

1. Konsep Peta Jalan Pendidikan dalam penyajian belum terstruktur secara sistematis dan memberikan penjelasan substansi-substansi penting arah kebijakan pendidikan secara utuh serta tidak dilengkapi kajian akademik;
2. Penyusunan Konsep Peta Jalan Pendidikan tidak merefleksikan dimensi kesejarahan bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi titik tolak penyusunan kebijakan visi program, evaluasi dan antisipasi pendidikan masa depan;
3. Konsep Peta Jalan Pendidikan belum mengangkat kajian dimensi profil sosio-antropologi manusia Indonesia yang memiliki akar budaya bangsa, dan tradisi spiritual-religius;
4. Perlu meninjau landasan pendidikan pada substansi pendidikan dasar pada Konsep Peta Jalan Pendidikan khususnya pada program Merdeka Belajar, seperti landasan religius, filosofis, sosiologis, antropologis dan yuridis;
5. Profil Pelajar Pancasila pada Peta Jalan Pendidikan harus sesuai dengan UUD NRI 45 serta UU Sisdiknas 2003 dan dikuatkan dengan dimensi "kewarganegaraan" untuk penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran diri siswa sebagai warga negara Indonesia;
6. Kebijakan pendidikan dasar pada Peta Jalan Pendidikan perlu diorientasikan pada pendidikan karakter, jatidiri dan integritas sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, melalui Trisakti Jiwa, yaitu cipta-rasa dan karsa, kemudian diseimbangkan dengan kemampuan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung;
7. Kebijakan Pendidikan menengah pada Peta Jalan Pendidikan perlu diorientasikan untuk tahapan penguatan keterampilan umum dan vokasi yang memuat ragam kompetensi keahlian untuk melahirkan tenaga ahli profesional dan akademis di universitas;

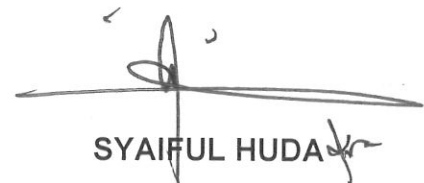
8. Peta Jalan Pendidikan belum fokus pada perencanaan dan implementasi yang terintegrasi (satu tarikan nafas) atas beberapa komponen pendidikan yaitu, standar kompetensi siswa dan guru, struktur dan konten kurikulum, sistem asesmen nasional, dan pendidikan guru (LPTK dan PPG);
 9. Peta Jalan Pendidikan harus menciptakan satu institusi tunggal dan profesional yang memiliki otoritas untuk merancang dan mengelola standar kompetensi siswa, kurikulum sekolah, sistem pembelajaran, dan sistem asesmen;
 10. Peta Jalan Pendidikan belum mencerminkan perbaikan mendasar mengenai tata kelola pendidik, antara lain:
 - 1) Skema evaluasi yang kuat (*robust*) dan komprehensif terhadap mutu pendidikan guru.
 - 2) Skema evaluasi yang kuat (*robust*) dan berskala nasional terhadap program sertifikasi guru.
 - 3) Merancang mekanisme yang terintegrasi (satu tarikan nafas) untuk mengelola: standar kompetensi siswa/guru, kurikulum sekolah, sistem asesmen, sistem pelaporan capaian standar, serta umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, di dalam sebuah institusi yang profesional, independen, dan memiliki otoritas penuh.
 - 4) Skema transformasi mendasar pendidikan guru (LPTK) sebagai *pre-service education* yang bertugas untuk menghasilkan guru kredensial yang bermutu, dan dapat menjadi masukan calon guru yang bermutu bagi sistem pembinaan profesi guru berkelanjutan setelah bekerja.
 - 5) Penataan kembali peraturan perundangan mengenai semua komponen sistem tatakelola guru agar terintegrasi secara sistemik, yang meliputi: UUSPN No, 20/2003, UUGD No. 14/1005, UUPT No. 12/2012, UUPD No. 23/2014, UUASN No. 5/2017, dan sejenisnya, yang mengatur tentang guru di dalam nafas yang berlainan; peraturan guru yang terintegrasi ini merupakan bagian dari "omnibus law" di bidang pendidikan.
 11. Peta Jalan Pendidikan perlu memasukkan aspek kajian hidrometeorologis (bencana alam), agar pendidikan menjadi sektor prioritas dalam percepatan penanganan penanggulangan bencana dalam hal penganggaran, pendanaan, mobilisasi yang berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan di situasi darurat dan pemulihan sektor pendidikan akibat bencana harus masuk dalam prioritas dalam rancangan perubahan undang-undang penanggulangan bencana.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendorong Kemendikbud RI untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pakar pendidikan dan K/L terkait lainnya dalam penyusunan dan perbaikan Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035;

2. Mendorong Kemendikbud RI agar semua kebijakan yang akan dikeluarkan (a.l. Peta Jalan Pendidikan) memiliki landasan hukum yang kuat dan kajian akademik;
 3. Mendorong Kemendikbud RI melakukan kunjungan ke daerah secara berkelanjutan untuk mendengarkan masukan dari pemangku pendidikan di daerah sehingga kebijakan pendidikan memiliki landasan empirik yang kuat untuk menjawab permasalahan pendidikan;
 4. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan perlu memperhatikan aspirasi kebutuhan pelajar millennial;
 5. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan perlu memasukkan aspek pendidikan inklusi dengan pelibatan keluarga dan lingkungan.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.40 WIB.

KETUA RAPAT,



SYAIFUL HUDA